

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI
PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) PADA
KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG BALI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh

Ni Kadek Riza Andini

NIM 2015713051

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Kadek Riza Andini

NIM : 2015713051

Prodi/Jurusan : D3 Administrasi Bisnis/Administrasi Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

“IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR”

Adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Ni Kadek Riza Andini

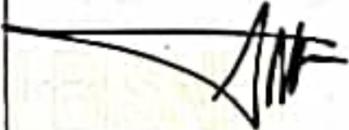
NIM 2015713051

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR

Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Ijazah Diploma Tiga
Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

Ni Kadek Riza Andini
NIM 2015713051

Badung, 25 Agustus 2023
Disetujui oleh,

Nama Penguji	Tanda Tangan
Ketua Dosen Penguji, I Made Ardana Putra, M.Si NIP. 195912311989031012	
Dosen Penguji 1, Ida Bagus Dananjaya, S.E., M.M NIP. 0009049305	
Dosen Penguji 2, Gede Pradiva Adiningrat, S.AB., M.AB NIP. 199201312019031011	

Dosen Pembimbing 1,



(I Made Ardana Putra, M.Si)
NIP. 195912311989031012

Dosen Pembimbing 2.



(Ida Bagus Sanjaya, SE, MM)
NIP. 196307301989031002

Disahkan oleh,
Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,



(Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE., MBA., Ph.D)
NIP. 196409291990032003

Diketahui oleh,
Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua,



(I Made Widiantara, S.Psi., M.Si)
NIP. 197902182003121002

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR”** dapat penulis selesaikan tepat dengan waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah Diploma III Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis dibantu oleh berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE, MBA,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Bapak I Made Widiantara, S.Psi., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan petunjuk dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

agar mampu terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Bapak Drs. I Made Ardana Putra, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan pengarahan dan dukungannya terhadap penulisan Tugas Akhir ini hingga selesai pada waktunya.
5. Bapak Ida Bagus Sanjaya, SE,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi dukungan, pengarahan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan sehingga selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan serta dorongan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
7. Seluruh staf Jurusan Administrasi Bisnis yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan.
8. Bapak Opik Taufik selaku Kepala Kantor Cabang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat penyusunan tugas akhir.
9. Seluruh staff dan karyawan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar yang telah membimbing serta kesediannya dalam membantu

penulis untuk memberikan informasi dan data-data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

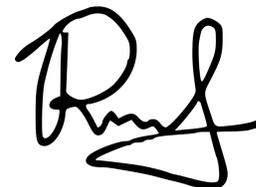
10. Keluarga, sahabat serta teman-teman yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. I Komang Mori Nuartha yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian Tugas Akhir ini melalui kehadiran, waktu, tenaga, serta semangat dan dorongan yang telah diberikan.

12. Ni Putu Novita Dewi yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini. Besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca baik yang ada di lingkungan Politeknik Negeri Bali ataupun di luar lingkungan Politeknik Negeri Bali.

Badung, 28 April 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Sumber Daya Manusia (SDM)	19
B. Jaminan Sosial.....	20
C. SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)	22
D. Sektor Bukan Penerima Upah.....	24
E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ..	26
F. Kesejahteraan Sosial	28
G. Flowchart	30
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah Perusahaan	35
B. Bidang Usaha.....	40
C. Struktur Organisasi	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Kebijakan Perusahaan	59
B. Analisis dan Interpretasi Data	61

BAB V SIMPULAN dan SARAN.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah peserta Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.....	8
Tabel 2.1 Simbol <i>Flowchart</i>	31
Tabel 4.1 Data klaim peserta jaminan sosial di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.....	86
Tabel 4.2 Hasil Fokus Penelitian	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif.....	18
Gambar 3.1 Logo BPJS Ketenagakerjaan	38
Gambar 3.2 Struktur Organisasi di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar	44
Gambar 4.1 Bagan Alir Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) Secara <i>Offline</i>	64
Gambar 4.2 Kartu Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)	66
Gambar 4.3 Bagan Alir Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) Secara <i>Offline</i> melalui agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI)	67
Gambar 4.4 Bukti Pembayaran Kepesertaan BPU	69
Gambar 4.5 Bagan Alir Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) secara <i>online</i> melalui <i>website</i> resmi BPJS Ketenagakerjaan.	70
Gambar 4.6 <i>Dashboard</i> Pendaftaran <i>Online</i> Bukan Penerima	71
Gambar 4.7 Halaman Pengisian Data Diri Calon Peserta BPU	72
Gambar 4.8 Halaman Pengisian Data Individu Pekerja BPU.....	73
Gambar 4.9 Halaman Pengisian Informasi Pekerjaan Calon Peserta BPU	74
Gambar 4.10 Halaman Pemilihan Program dan Periode Pembayaran Calon Peserta BPU	75
Gambar 4.11 Halaman Konfirmasi Kebenaran Data Calon Peserta BPU	76

Gambar 4. 12 Halaman Pembayaran Calon Peserta BPU 77

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pendaftaran Peserta
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4 : Penggunaan Karya Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh suatu negara jika ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya dari suatu bangsa secara terarah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Membangun kesejahteraan rakyat merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat dengan memberi perhatian utama agar tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Selain itu, pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya merupakan suatu interaksi dari berbagai kelompok variabel seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Sehingga pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam

mengelolanya. Manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan dan juga konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri. Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia dapat berperan sebagai suatu faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Agar dapat mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pembentuk *human capital* (modal manusia). Menurut Ricky dan Retno (2019:248) menyampaikan bahwa *human capital* dapat diartikan sebagai manusia itu sendiri baik perorangan maupun tim dalam hal kapabilitas individunya, pengetahuan, komitmen, dan pengalaman pribadi yang dipinjamkan kepada perusahaan. *Human capital* merupakan segala sesuatu mengenai manusia dengan semua kapabilitasnya sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan agar dapat mencapai tujuannya.

Human Capital (modal manusia) sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, seperti di Indonesia saat ini pertumbuhan ekonomi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor-sektor seperti industri, pariwisata hingga infrastruktur dan pertumbuhan ini menciptakan permintaan tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berkembang. Sehingga dalam hal ini tenaga kerja memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan atau bisa dikatakan sebagai aktor utama dalam

pembangunan dan aktivitas ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pentingnya peran tenaga kerja di Indonesia perlu untuk diberikan kesejahteraan. Dalam rangka memastikan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia, sangatlah penting untuk menerapkan kebijakan serta program yang mendukung untuk pemberian upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, akses terhadap jaminan sosial, pelatihan kerja yang berkualitas, serta perlindungan hukum yang kuat. Sehingga akan memberikan manfaat yang luas bagi tenaga kerja itu sendiri, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara mengembangkan gerakan jaminan sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi para tenaga kerja. Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Dalam hal ini pelaku yang menyediakan jaminan sosial ialah penyelenggara program jaminan sosial. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan

perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat terutama tenaga kerja. Perlindungan sosial ekonomi di Indonesia telah di atur pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dimana Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 menjelaskan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mencakup 3 poin, diantaranya:

1. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
2. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan 3 poin tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi, peran badan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi sangat penting. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS

menyelenggarakan jaminan sosial nasional yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari BPJS adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan merubah ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menambah jenis program jaminan sosial menjadi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Hari Tua
3. Jaminan Pensiun
4. Jaminan Kematian
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerja dengan jenis keanggotaan yaitu pekerja Penerima Upah (PU) dan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Penerima Upah (PU) merupakan pekerja yang bekerja di perusahaan atau setiap orang yang bekerja

dengan menerima gaji, upah atau imbalan dari pemberi kerja. Sedangkan Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan pekerja yang melakukan kegiatan ekonomi atau usaha sendiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usaha yang dilakukannya.

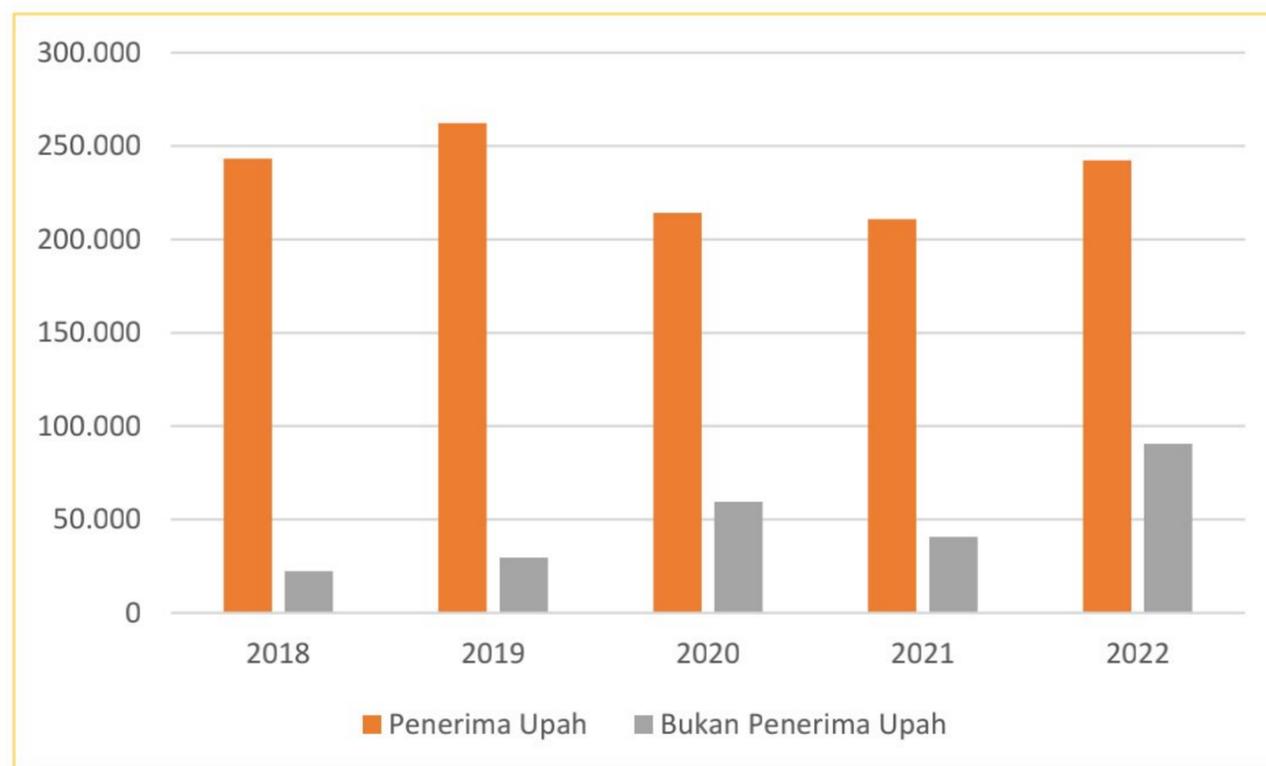
Pada setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban ini didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur tentang hubungan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, perusahaan sektor penerima upah cenderung lebih aktif dalam mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja Penerima Upah (PU) lebih terinformasi tentang keberadaan BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat program yang diberikan. Sehingga mereka sadar akan pentingnya memiliki jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan dengan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, sektor Penerima Upah (PU) umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik terutama dalam dukungan administratif dalam mendukung proses pendaftaran. Sedangkan pada Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum yang mengharuskan mereka untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena sistem BPJS Ketenagakerjaan didesain dengan pendekatan opsional, di mana pekerja memiliki kebebasan untuk memilih menjadi peserta atau tidak. Ini disebabkan oleh sifat pekerjaan BPU yang seringkali mandiri, beragam, dan tidak

melibatkan perusahaan yang mengelola iuran BPJS Ketenagakerjaan mereka.

Oleh karena itu Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seringkali lebih pasif dalam mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena kurangnya informasi yang memadai tentang keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat program yang ditawarkan. Keterbatasan akses informasi, kurangnya kampanye edukasi, serta kompleksitas prosedur pendaftaran dapat membuat BPU merasa terhambat atau bahkan kurang tertarik untuk bergabung. Sehingga mereka kurang memiliki kesadaran tentang perlindungan ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang bermanfaat untuk para pekerja. Selain itu, pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) biasanya mengalami kesulitan administratif dalam melakukan pendaftaran yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari peserta mengenai proses pendaftaran dan administrasi yang diperlukan. Faktor lain terdapat dalam pembayaran iuran bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), dikarenakan banyak pekerja BPU memiliki penghasilan yang tidak menentu, terbatas, atau bahkan tidak terjamin, seperti pekerja harian, pekerja lepas, atau pengusaha kecil yang menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan. Selain itu, pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seringkali bekerja dalam sektor informal di mana jaminan sosial tidak selalu diintegrasikan dengan pekerjaan mereka, sehingga iuran BPJS menjadi tambahan beban keuangan yang mungkin sulit diatasi. Ketidakpastian dalam pendapatan dan beban keuangan yang

sudah ada bisa membuat pembayaran iuran menjadi prioritas yang lebih rendah, terutama ketika kebutuhan sehari-hari dan keluarga harus dipertimbangkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat perbandingan yang signifikan antara segmen peserta Penerima Upah (PU) dengan peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini dapat dilihat dari perbandingan yang menjadi peserta di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar baik peserta Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU).

Tabel 1.1 Jumlah peserta Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar



Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, 2023

Dari grafik di atas data Jumlah peserta Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar pada tahun 2018 perbandingan peserta Penerima Upah (PU) dengan Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 243.146 peserta berbanding 22.264 peserta. Tahun 2019 sebanyak 262.321 peserta berbanding 29.617 peserta. Pada tahun 2020 sebanyak 214.295 peserta berbanding 59.563 peserta. Tahun 2021 sebanyak 210.828 peserta berbanding 40.770 peserta. Dan pada tahun 2022 sebanyak 242.306 peserta berbanding 90.490 peserta. Walaupun jumlah peserta Bukan Penerima Upah (BPU) mengalami peningkatan di tahun 2022, namun jika dibandingkan dengan jumlah peserta Penerima Upah (PU) yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan cabang Bali Denpasar masih sangat jauh yaitu sebesar 24%. Sehingga pemerintah perlu lebih maksimal dalam mengedukasi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memiliki jaminan sosial dan manfaat yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) serta dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jumlah peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sangat perlu diperhatikan agar mendapatkan perlindungan yang memadai guna mencapai kesejahteraan sosial. Dilihat dari pengamatan penulis bahwa di lapangan masih banyak pekerja Bukan

Penerima Upah seperti pedagang, *driver online*, sopir dan lainnya belum mendaftarkan dirinya dikarenakan belum mengetahui perbedaan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penduduk yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak ingin mendaftar lagi di BPJS ketenagakerjaan karena menambah biaya pengeluaran dalam perbulannya. Serta isu yang masyarakat rasakan terkait lamanya proses klaim dana bantuan asuransi.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) PADA KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BALI DENPASAR”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar?
2. Apa faktor penghambat dari implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh ijazah Diploma III (tiga) jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.
- b. Untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa mengenai implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai topik implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Dapat dijadikan sebagai sumber bacaan yang berharga untuk melakukan perbandingan antara konsep-konsep teoritis dengan implementasinya dalam praktik yang terjadi di lingkungan perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi perusahaan ke depannya untuk bisa lebih menyempurnakan program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengukur sejauh mana program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam memenuhi tujuan yang diharapkan serta dapat melakukan peningkatan yang lebih maksimal.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk Nomor 143, Panjer, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

2. Objek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah “implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar”.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Kualitatif

“Data Kualitatif adalah data yang berupa kalimat, kata atau gambar” (Sugiyono, 2015:23). Dalam hal ini data kualitatif yang didapatkan penulis seperti, sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kebijakan mengenai kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) serta hasil wawancara dan observasi yang dilakukan.

2) Data Kuantitatif

“Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan” (Sugiyono, 2014:45). Dalam hal ini penulis memperoleh data jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta Penerima Upah (PU) dan peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tahun 2018-2022 pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2019:194) “data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam hal ini data primer diperoleh secara langsung dari perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Bidang

Kepesertaan dengan melakukan wawancara pada staff Account Representative Khusus serta dengan peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) “data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Pada penelitian ini data sekunder yang diperoleh penulis yaitu dari jurnal penelitian terdahulu, *website* resmi perusahaan serta artikel yang berkaitan dengan kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU).

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan pada obyek yang diteliti. Dalam tahap observasi ini penulis terlibat secara langsung dalam sosialisasi program jaminan sosial Bukan Penerima Upah (BPU) kepada masyarakat serta melakukan pengamatan terhadap staff BPJS Ketenagakerjaan yang melaksanakan edukasi dan sosialisasi.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi antara dua orang dengan cara bertanya untuk memperoleh informasi terhadap suatu topik tertentu.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono (2018: 467) “wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 3 (tiga) orang staff BPJS yang menjabat sebagai ARK (Account Representative Khusus) serta 3 (tiga) orang peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang dilaksanakan di Ruang Kepesertaan, *Lobby* Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali Denpasar dan Terminal Ubung.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini dokumen yang digunakan berasal dari literatur dan dokumen instansi yang berupa brosur kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU), informasi dalam *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan serta foto-foto kegiatan.

4) Triangulasi

Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah

ada (Sugiyono, 2015:83). Mulai dari sumber data yang didapat secara langsung seperti wawancara dan observasi, hingga yang didapat secara tidak langsung seperti dokumen dan arsip. Dengan menggabungkan data dari sumber-sumber yang berbeda, peneliti dapat membandingkan temuan dari masing-masing sumber untuk melihat kesamaan dan perbedaan. Sehingga dengan triangulasi peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kuat.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode/cara dalam mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat mudah untuk dipahami. Untuk menganalisis permasalahan yang akan dihadapi dan mempermudah dalam pemecahan masalah di atas maka penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang menguraikan dan menjelaskan secara lengkap tentang masalah yang diteliti berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan selama melakukan penelitian. Dengan cara mengumpulkan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dapat membuat kesimpulan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019: 321) berpendapat bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh". Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

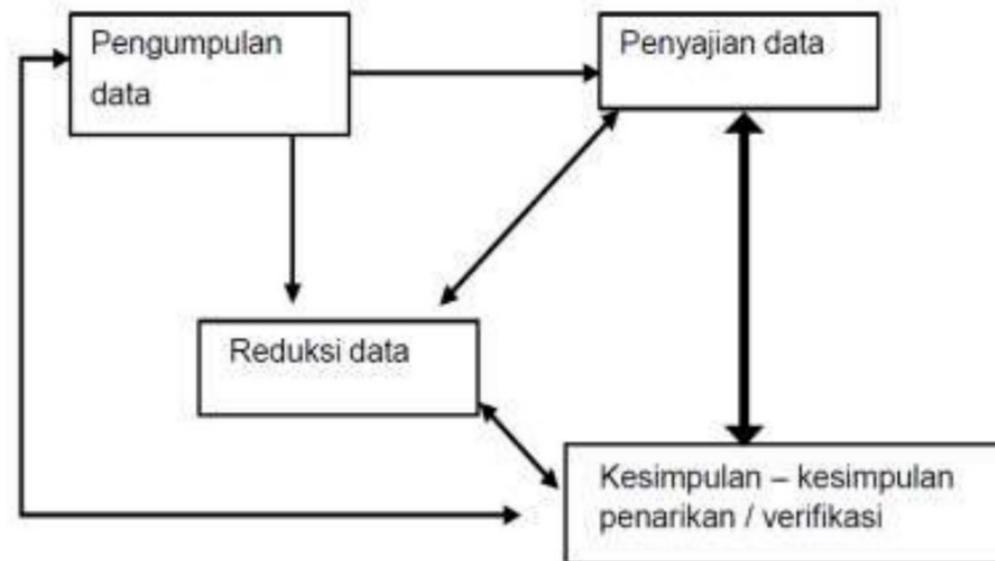
Mengolah data dengan memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting agar data tidak jenuh (buram) dan diketahui pokok-pokok pentingnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data dengan mendeskripsikan data yang telah diklasifikasi dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.

d. Kesimpulan-kesimpulan penarikan / verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif deskriptif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



Gambar 1.1 Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif

(Sumber : Buku Metode Penelitian Bisnis oleh Prof. Dr. Sugiyono,2018)

BAB V

SIMPULAN dan SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pendaftaran peserta Bukan Penerima Upah (BPU) terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan yaitu dengan datang langsung ke kantor cabang, melalui agen PERISAI dan dapat melalui *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dari ketiga metode pendaftaran tenaga kerja lebih banyak memilih metode pendaftaran melalui agen PERISAI. Dikarenakan tenaga kerja merasa lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan penjelasan yang lebih terperinci tentang persyaratan, manfaat, dan prosedur pendaftaran. Serta menguntungkan bagi tenaga kerja yang kurang memahami teknologi

2. Faktor yang menjadi penghambat implementasi program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yaitu kurangnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga tenaga kerja dalam sektor Bukan Penerima Upah (BPU) yang mendaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih tergolong sedikit.

B. Saran

1. BPJS Ketenagakerjaan perlu mengoptimalkan peran agen PERISAI dikarenakan tenaga kerja lebih banyak memilih metode pendaftaran melalui agen PERISAI, perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan agen PERISAI. BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada agen PERISAI dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang persyaratan, manfaat, dan prosedur pendaftaran kepada peserta. Sehingga agen PERISAI dapat memberikan bantuan personal dan memberikan pelayanan yang baik agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan peserta.
2. BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan komunikasi dan informasi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengunggah video pengalaman nyata dari peserta yang telah merasakan manfaat dari program jaminan sosial tersebut. Selain menggunakan media sosial, sosialisasi secara langsung

di komunitas dan tempat kerja juga penting dilakukan. BPJS Ketenagakerjaan juga perlu memperbanyak jumlah agen PERISAI agar dapat mencakup peserta di daerah-daerah pelosok dan memberikan edukasi tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pemanfaatan media tradisional seperti radio dan surat kabar juga perlu dilakukan. Radio dapat digunakan dengan menyelenggarakan program siaran khusus yang mencakup wawancara dengan staff BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang program jaminan sosial. Selain itu, surat kabar juga dapat menyediakan artikel khusus tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan, persyaratan pendaftaran, cara mendaftar, dan manfaat yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Faisal. 2023. "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten Batu Bara". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, Vol. 1, No. 2.
- Ansory, H Al Fadjar & Indrasari Meithiana. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- BPJS Ketenagakerjaan. "Pendaftaran Online Bukan Penerima Upah (BPU)." <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu>. (Diakses 19 Juni 2023).
- Gorahe, Lusya Vivi. dkk. 2021. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe". *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1.
- Harahap, Sovia. dkk. 2023. "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padangsidempuan". *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)*, Vol. 3, No. 3.
- Nasution, Ratna Sari. dkk. 2020. "Rancang Bangun Aplikasi Pemilihan Pegawai Berprestasi Dengan Metode Profile Matching Berbasis Android Pada BPJS Ketenagakerjaan". *Jurnal FTIK*, Vol. 1, No. 1.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (3rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Risna. "BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU): Manfaat dan Pengertian." *Insight Talenta*.
<https://www.talenta.co/blog/keanggotaan-bukan-penerima-upah-bpu-bpjs/> (Diakses 20 Juni 2023)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarmintyastuti, Lies & Suprpto, Hugo Aries. 2019. "Pengembangan SDM Melalui Minat dan Motivasi Santriwati pada Yayasan Taufidzul Qur'an Ar-Rahmani di Ciputat Tangerang Selatan". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 6, No.2.
- Supriyanto, Raditia Wahyu. dkk. 2014. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Wiranda, Fani. dkk. "Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Desktop Di Mts Swasta Islamiyah (Ypi) Pontianak". Disajikan pada Thesis Diploma tgl 20 Maret 2023 di Fakultas Pendidikan Mipa dan Teknologi IKIP PGRI Pontianak.

Yohanes, R. & Hidayati, R. 2019. "The Effect Of Human Capital, Entrepreneurship Orientation And Market Orientation On Competitive Advantage (Case Study On Hospitality Industry In Central Java)". e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, 7 Nomer 3, 247-257.